

**RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 2021**

Area Perubahan	Indikator	Rencana Aksi	Bulan												Penanggung jawab
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(2)	(3)	(4)													
Manajemen Perubahan	1 Indeks Kepemimpinan Perubahan	a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi													Pokja Manajemen Perubahan
		b. Penyusunan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi													
		c. Menyusun Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi													
		d. Sosialisasi Road Map dan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi													
		e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi													
		f. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB													
		g. Pembentukan dan Internalisasi Agen Perubahan sesuai Permenpan 27 Tahun 2014													
Penataan Peraturan Perundang- undangan	2 Indeks Reformasi Hukum	a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan regulasi daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus													Pokja Penataan Peraturan Perundangan

		b.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan regulasi daerah												
3	Indeks Kualitas Kebijakan	a.	Melakukan deregulasi aturan yang menghambat birokrasi												
		b.	Penguatan sistem regulasi daerah												
		c.	Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan												
		d.	Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun												
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4	Indeks Kelembagaan	a.	melaksanakan pemetaan transformasi jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional											
			b.	Menyusun SOTK berdasarkan hasil penyelarasan KMDN 050-3708 Tahun 2020											
			c.	Menyusun rancangan tugas dan fungsi berdasarkan SOTK hasil penyelarasan											
			d.	Melaksanakan penghitungan kematangan organisasi berdasarkan PMDN No. 99 Tahun 2018											
			e.	Menyusun SOTK hasil persetujuan Kemendagri terkait transformasi jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional											

**Pokja
Penataan
Organisasi**

			f. Menyusun rancangan tugas dan fungsi berdasarkan hasil persetujuan Kemendagri terkait transformasi jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional														
Penataan Tatalaksana	5	Indeks SPBE	a. Menyusun Arsitektur SPBE														
			b. Menyusun Peta Rencana SPBE														
			c. Menyusun tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE														
			d. Menerapkan manajemen layanan SPBE														
			e. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan														
	6	Indeks Pengawasan Kearsipan	a. mengimplementasikan manajemen karsipan modern dan handal (dari manual ke digital)														
			b. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan														
			c. Mengimplementasikan digitalisasi arsip														
	7	Indeks Pengelolaan Keuangan	a. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan														
	8	Indeks Pengelolaan Aset	a. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku														
	9	Indeks Pemerintahan Daerah	a. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik														

**Pokja
Penataan
Tatalaksana**

		b. Peningkatan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)											
		c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala											
		d. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan dan penganggaran											
		e. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja											
Pengawasan	15	Maturitas SPIP	a. Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi										
	16	Kapabilitas APIP	a. Meningkatkan kompetensi APIP										
	17	Opini BPK	a. Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)										
	18	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	a. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku										
			b. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan										
			c. Pembangunan unit kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM										

**Pokja
Pengawasan**

		d. Penciptaan, pengembangan dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik											
		e. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis Mal Pelayanan Publik											
		f. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala											
		g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala											
		h. Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat											
		i. Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan masyarakat											

